

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN: REMBUK WARGA TENTANG MUSRENBANG GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Krisna Aditya

krisna.aditya48@gmail.com, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Abstract. *The RW16 Jatihandap Residents Consultation is a development communication forum that aims to improve community welfare and infrastructure. Musrenbang (Development Planning Conference) is a development planning process that involves the community. The aim of this research is to analyze the role of the Jatihandap RW16 Residents' Consultation in improving community welfare and infrastructure through the 2025 Musrenbang. This research uses qualitative methods with data collection and observation techniques. Data were analyzed using thematic analysis techniques. The research results show that the RW16 Jatihandap Residents' Consultation has an important role in improving community welfare and infrastructure through the 2025 Musrenbang. Effective development communication and community participation in the Residents' Consultation and Musrenbang can increase community awareness and involvement in development.*

Keywords : *Development Communication, Community Crushing, Musrenbang, Welfare.*

Abstrak. Rembuk Warga RW16 Jatihandap merupakan salah satu wadah komunikasi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur. Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) adalah salah satu proses perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Rembuk Warga RW16 Jatihandap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur melalui Musrenbang tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan observasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rembuk Warga RW16 Jatihandap memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur melalui Musrenbang tahun 2025. Komunikasi pembangunan efektif dan partisipasi masyarakat dalam Rembuk Warga dan Musrenbang dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

KATA KUNCI : Komunikasi Pembangunan, Rembuk Warga, Musrenbang, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, dikenal dengan julukan "Kota Kembang" karena keindahan alamnya yang mempesona dan udara yang sejuk. Terletak di dataran

tinggi, kota ini dikelilingi oleh pegunungan, membuatnya menjadi daya tarik, autentik serta budaya khas suku sunda. Salah satu pesona utama Bandung adalah alamnya nyaman saat musim hujan agak dingin dengan udara yang segar disertai pembangunan kota dengan infrastruktur yang berkembang.

Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, merupakan bagian dari kawasan Bandung Utara, Kota Bandung. Luas wilayahnya 167,60 ha terbagi dalam 17 wilayah lingkungan Rukun Warga (RW), dengan Luas RW16 (Hektar) 5,60 ha. Berbatasan Kelurahan Pasir Layung bagian Barat, Kecamatan Cibeuying Kidul, berdampingan dengan Sungai Cipamokolan dekat dengan tempat wisata budaya Saung Angklung Udjo.

Lokasi geografis ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Jatihandap berada pada ketinggian 700 m diatas permukaan air laut, 9,6 km dari pusat kota. Bersama warga Jatihandap dan *steakholder*, tinjauan yang pertama adalah komunikasi pembangunan. Pembangunan merupakan proses perjalanan yang melibatkan banyak pihak. Di dalamnya, partisipasi masyarakat dan komunikasi pembangunan yang efektif berperan penting dalam menentukan keberhasilan dan dampak positif dari berbagai aspek pembangunan. Ini melibatkan pertukaran informasi, ide, dan pengalaman. Dengan komunikasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih membangun pemahaman bersama, serta berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Dalam rembuk warga, masyarakat diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan kebutuhan serta harapan mereka terkait pembangunan di lingkungan mereka. Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kemudian hasil pelaksanaan rembuk warga masuk proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung.

Dasar hukum yang melandasi penyusunan pelaksanaan Musrenbang Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan yaitu ; “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)” ; “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” ; “Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” ; “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah” dan “Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026”.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan memerlukan koordinasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, yang salah satunya dapat dicapai melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang diselenggarakan secara bertahap mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyelenggaraan Musrenbang diharapkan dapat mempertemukan proses perencanaan *top-down* berupa rangkaian program prioritas pemerintah daerah dengan proses perencanaan *bottom-up* berupa usulan pembangunan dari tingkat masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang tahap pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan pelaksanaan Konsultasi Masyarakat, dimana pada tahap ini RW dan pemangku kepentingan lainnya mengadakan forum dialog untuk membahas dan menyetujui program pembangunan yang diperlukan.

Dalam rangka menjaga kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan Rembuk Warga diperlukan suatu panduan berupa petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga diharapkan forum Rembuk Warga ini menghasilkan rumusan rencana pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk menjaga kesamaan pandangan dan pemahaman atas ketetapan proses Musyawarah Masyarakat, diperlukan suatu pedoman berupa petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga diharapkan forum Musyawarah Masyarakat ini menghasilkan rumusan konsep pembangunan yang mampu mempresentasikan kebutuhan penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Sebagai acuan penyelenggaraan Musyawarah Masyarakat di tingkat RW menuju Musrenbang; untuk lebih fokus, tepat sasaran dan sinergis antar sektor dan daerah, penting juga kiranya memahami tinjauan pustaka, sebagai berikut:

Konsep Komunikasi Pembangunan

Komunikasi pembangunan melibatkan berbagai kegiatan seperti sosialisasi informasi, pendidikan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Selain istilah-istilah yang telah diuraikan di atas, kegiatan komunikasi pembangunan yang relevan antara lain: penyuluhan pembangunan, pengembangan masyarakat, rekayasa sosial (perbaikan kondisi sosial), dan lain-lain. Namun yang akan dituliskan di bawah ini hanyalah sosialisasi pembangunan dan pengembangan masyarakat.

a) Penyuluhan Pembangunan

Asal kata yang tepat atau bisa diterjemahkan kepanjangannya dari kata suluh yang artinya obor atau seruas bamboo yang diisi minyak tanah, yang dalam arti kata mampu memberikan terang, dari keadaan gelap menjadi terang. Konseling pembangunan merupakan upaya mengubah pola perilaku masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Penyuluhan pembangunan juga dikenal dengan nama pemberdayaan masyarakat atau pengembangan kapasitas. Prinsip penyuluhan pembangunan yakni melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Fasilitator atau penyuluh perlu memahami kebutuhan, aspirasi, dan kondisi lokal masyarakat agar program yang disampaikan relevan dan dapat diterima dengan baik. Masyarakat diharapkan dapat mandiri dan mengatasi tantangan dinamika problem sosial masyarakat. Contoh penyuluhan yang relevan dengan Musrenbang diantaranya pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, penyuluhan pembangunan dapat menjadi saluran yang efektif untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong perubahan positif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, melalui penyuluhan pembangunan mengajak, membimbing dan berinteraksi langsung dengan masyarakat baik melalui tatap muka, padat karya, lokakarya, pelatihan lebih mudah.

b). Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat harus didasarkan pada pendekatan partisipasi, terpadu-menyeluruh atas kebutuhan masyarakat. Menurut Taruna (2021), partisipasi fungsional memiliki ciri-ciri (i) masyarakat berpartisipasi dengan cara membentuk kelompok untuk merumuskan langkah-langkah mencapai tujuan kegiatan; (ii) pembentukan kelompok seperti itu (biasanya) terjadi setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati; dan (iii) pada awalnya pembentukan kelompok dan proses berkeputusan dipandu oleh pihak luar (fasilitator), tetapi pada saatnya harus segera mandiri. Sedangkan menurut Twelvetrees pengembangan masyarakat adalah *“the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.”* Artinya “proses membantu masyarakat biasa untuk meningkatkan komunitas mereka sendiri dengan melakukan tindakan kolektif.”

Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disingkat Musrenbang yaitu tempat pertemuan untuk bertukar pikiran suatu perencanaan dalam menjalankan wewenang pusat untuk menyangkut perangkat masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Musrenbang ini dilaksanakan di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari kesatuan wilayah atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat daerah provinsi. Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah unit kerja instansi yang dilaksanakan di tingkat kelurahan. Tujuan utama dari Musrenbang Kelurahan adalah untuk menjangring aspirasi, kebutuhan, dan usulan masyarakat yang nantinya akan menjadi bagian dari prioritas di tingkat kelurahan dan akan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (kecamatan dan seterusnya).

Forum Musrenbang dilaksanakan dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan perwakilan dari berbagai kelompok. Diskusi dan musyawarah dipimpin oleh ketua panitia / RW setempat untuk membahas dan memprioritaskan usulan-usulan yang dikumpulkan dalam berita acara. Hasil dari Musrenbang Kelurahan berupa daftar prioritas usulan pembangunan yang kemudian disusun menjadi rencana pembangunan kelurahan. Dokumen tadi akan dijadikan acuan untuk rencana pembangunan di tingkat kelurahan dan akan diteruskan ke Musrenbang Kecamatan.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada tingkat kenyamanan, kemakmuran, dan kualitas hidup yang dirasakan oleh anggota suatu komunitas atau masyarakat. Istilah ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang saling terkait, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, pendapatan, dan hubungan sosial. Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, diperlukan peran dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat itu sendiri. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan : memastikan bahwa pembangunan diharapkan mampu memberikan kesejahteraan yang mencakup tiga pilar yaitu pemenuhan kebutuhan (ekonomi), kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kualitatif partisipatif. Pada kajian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif orang-orang yang terlibat langsung, dengan cara melibatkan mereka sebagai rekan dalam penelitian, bukan hanya sebagai subjek. Metode ini sering

digunakan dalam cara tindakan partisipatif (*Participatory Action Research/PAR*), yang menggabungkan penelitian dengan tindakan nyata untuk memberdayakan partisipan dan menghasilkan perubahan positif.

Penelitian diarahkan untuk mencari gejala yang kemudian dijelaskan melalui analisis atas objek yang menjadi bidang penelitian. Sesuai dengan pernyataan Bogdan dan Taylor, “metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa perkataan lisan maupun tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati”. (Hadisaputra, 2021).

Bersumber pada pengertian diatas, tulisan ini diarahkan untuk melihat bagaimana proses komunikasi rembuk warga di RW16 Kelurahan Jatihandap dan dampak komunikasi efektif terhadap kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur. Sebagian bahan analisis, keterlibatan masyarakat dalam proses rembuk warga menuju Musrenbang guna kesejahteraan masyarakat menjadi unit analisis dan kemudian digolongkan sebagai data primer dengan bentuk pengayaan dari sumber-sumber lainnya sebagai data pendukung atau data sekunder. Riset dengan metode kualitatif ditawarkan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dari sudut pandang orang-orang yang terlibat. Ini melibatkan pengumpulan data yang deskriptif dan lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rembuk Warga merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk menggali aspirasi masyarakat dan menyusun rencana pembangunan satu tahun kedepan untuk RW 016 Jatihandap. Kegiatan ini merupakan wadah diskusi terbuka antar kelurahan, masyarakat dan pemangku kepentingan. Rembuk ini juga dapat menjadi ajang pertemuan antara warga, pengurus RT dan RW. Kedekatan yang tercipta dapat membuat masing-masing pemangku kepentingan saling berkomunikasi dan percaya. Di sinilah modal sosial yang lebih kuat dibangun.

Interelasi komunikasi dengan pembangunan ataupun perubahan dalam masyarakat merupakan indikasi sekaligus agen perubahan sosial. Efeknya, perubahan masyarakat akan disesuaikan dengan sistem komunikasi masyarakat: tidak bermedia (*oral*), bermedia (*mediated*) atau tradisional-modern.

Adapun tahapan pelaksanaan Rembuk Warga, dimulai dengan pra rembuk warga sebelum masuk pada Rembuk Warga yang mana usulan prioritas sesuai dengan pagu indikatif (lihat gambar 1).



Gambar 1
Tahapan Rembuk Warga

Kata Musyawarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian ; perundingan atau perembukan. Ada pun tujuan musyawarah yakni mencari solusi bersama untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan dan membangun kesepakatan dalam kebersamaan. Dalam konteks Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah proses perundingan antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Sebagai forum untuk bermusyawarah antar pemangku kepentingan, musrenbang diharapkan mampu menjabatani dan mewedahi hal-hal yang di inginkan masyarakat dan masuk skala prioritas usulan perencanaan. Oleh karena itu, musrenbang sering juga disebut sebagai wahana untuk saling bersilaturahmi di antara sesama warga bangsa. Pemerintah, anggota legislative, kalangan perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan lainnya, dituntut untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan musrenbang di setiap jenjang.

Salah satu bentuk pelaksanaan Musrenbang, menyusun rencana pembangunan daerah yang dirancang oleh pemerintah daerah adalah Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah. “Rembuk Warga”, “Musrenbang Kelurahan”, “Musrenbang Kecamatan”, dan “Musrenbang Kota” berkorelasi dengan Musrenbang RKPD , dimana tempat, jadwal waktu pelaksanaan sudah ditentukan.

Musrenbang merupakan sebagai satu-satunya model untuk merumuskan perencanaan yang digarap oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran dimana realitasnya adalah di tahun depan. Selain itu, para anggota legislative di setiap tingkatan ketika masa reses tiba, diberi kesempatan untuk menggali sekaligus mendengar aspirasi rakyat berbasis pada daerah pemilihan masing-masing.

Inti pola pembangunan kaitannya dengan perencanaan pembangunan spesifik di Indonesia menekankan pada pengembangan kelembagaan dan mekanisme pembangunan yang melibatkan secara proaktif masyarakat, para pemuka dan pemimpin masyarakat dalam pe-ran serta pembangunan. Konsep pembangunan di Indonesia mengalami perubahan paradigma dengan fokus pada pembangunan berbasis masyarakat (*people-centered development*). Suadnya (2011) menekankan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Utamanya adalah saat

manusia tidak menjadi pusat pembangunan yang berarti dan berkelanjutan. Begitu pula dengan aktivitas para aktor yang terlibat dalam “Musrenbang” harus mulai memikirkan program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan yang meningkatkan intensitas keterampilan, keahlian dan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat. Sehingga tujuan dari perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan dapat tercapai sesuai harapan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil telaah teori dan pembahasan maka diambil kesimpulan, Komunikasi efektif “Rembuk Warga” RW16 Jatihandap berperan penting dalam membangun keterlibatan menuju kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur. Keterlibatan masyarakat dalam proses Rembuk Warga dan Musrenbang meningkatkan kesadaran dalam partisipasi pembangunan. Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga memberikan saran kepada *stakeholders* yang terlibat dalam musrenbang kiranya dapat merealisasikan pokok pikiran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga terkait harus terus meningkatkan pelayanan dan kualitas dengan membangun komunikasi efektif.

DAFTAR REFERENSI

Aminda, V. A. (2024). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University).

Dilla, S. (2007). Komunikasi Pembangunan pendekatan terpadu. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Rahman, M. T. (2018). Pembangunan Berbasis Masyarakat.

Purba, R. E. (2011). *Public Participation in Development Planning: A Case Study of Indonesian Musrenbang*. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5 (12).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Rahman, M. T. (2018). Pembangunan Berbasis Masyarakat.